

PELATIHAN PENGELOLAAN BURSA KERJA KHUSUS (BKK) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SE-PROVINSI RIAU

**Alum Kusumah^{1*}, Abunawas¹, Dwi Hastuti¹, Hammam Zaki¹,
Rahayu Setianingsih¹, Khusnul Fikri¹, Fitrien Ayuda¹, Febblina Daryanes²,
Johan Rahadi¹**

¹Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau

²Prodi Pendidikan Biologi Universitas Riau

*E-mail: alumkusumah@umri.ac.id

Article history

Received: 8/12/2023

Revised: 11/12/2023

Accepted: 18/12/2023

Published: 21/12/2023

Abstrak

Sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, dan merupakan mitra dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta. Begitu pula halnya BKK di Provinsi Riau yang harus bertungkus lumus untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada pihak berkepentingan dan juga melakukan survei lulusan dan pengguna lulusan sebagai bahan evaluasi pembelajaran yang sesuai kebutuhan zaman, dimana lulusan SMK memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dunia industri (DUDI). Pengelola BKK SMK mampu mensukseskan tracer study Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan internal sekolah dalam rangka mempersiapkan akreditasi.

Kata kunci: Bursa Kerja Khusus, SMK, Pelatihan, Tracer Study, Akreditasi

PENDAHULUAN

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai sub system pendidikan nasional yang bertanggungjawab dalam menyiapkan SDM tingkat menengah yang handal, berorientasi kepada kebutuhan industry harus mampu mengembangkan inovasi untuk mempengaruhi perubahan kebutuhan industri sehingga dapat mewujudkan kepuasan pencari kerja. Untuk menghubungkan siswa/i dengan pencari kerja SMK biasanya memfasilitasi siswa dan siswinya sebuah lembaga yang bernama Bursa Kerja Khusus (BKK). BKK adalah sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja (Depnakertrans RI, 2004).

Sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, dan merupakan mitra dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bursa Kerja Khusus (BKK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta. Begitu pula halnya BKK di Provinsi Riau yang harus bertungkus lumus untuk memberikan pelayanan dan informasi kepada pihak berkepentingan dan juga melakukan survei lulusan dan pengguna lulusan sebagai bahan evaluasi pembelajaran yang sesuai kebutuhan zaman, dimana

lulusan SMK memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dunia industri (DUDI).

Berdasarkan observasi yang dilakukan, terdapat berbagai persoalan yang dihadapi BKK di SMK di Provinsi Riau:

1. Sumber daya manusia dalam pengelolaan BKK masih rendah
2. Fasilitas pendukung BKK belum memadai seperti tidak mempunyai fasilitas website
3. Pengetahuan tentang tugas dan fungsi BKK belum maksimal

METODE

Pengabdian ini dilaksanakan 2 hari di Hotel Furaya Pekanbaru. Terdapat beberapa metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, diantaranya adalah:

1. Pemaparan materi
Metode ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi langsung kepada para pengurus BKK SMK di Provinsi Riau mengenai pengelolaan BKK.
2. Pelatihan.
Metode selanjutnya adalah pelatihan/praktek pengelolaan BKK yakni BKK SMK harus mensukseskan tracer study Jenderal Pendidikan Vokasi pada laman: <https://tracervokasi.kemdikbud.go.id/> dan selanjutnya pelatihan pembuatan google form pada laman: <https://docs.google.com/forms/u/0/?hl=id&tjif=d> dan website pada laman: <https://sites.google.com/new?hl=id&tjif=d> tracer study internal sekolah dalam rangka persiapan akreditasi sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian ini dilakukan dengan hasilnya sebagai berikut:

a. Hasil Pemaparan Materi

Pada tahapan ini dilakukan sosialisasi mengenai:

1. Tugas dan fungsi BKK SMK
2. Tracer study Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
3. Tracer study Sekolah dalam rangka persiapan akreditasi
4. Manfaat tracer study
5. Isi instrument tracer study
6. Laporan tracer study
7. Strategi tracer study
8. Pemasaran tenaga kerja

Gambar 1.
Absensi Kehadiran Peserta Pengurus BKK

Pada kegiatan materi, para peserta antusias mengikuti pelatihan. Ini terlihat banyaknya peserta yang aktif bertanya dan melakukan diskusi antar peserta dan juga kepada narasumber. Para peserta mulai memahami materi tugas utama dari BKK SMK. Materi diakses pada laman: <https://drive.google.com/drive/folders/198Ngya5vuQYEgLiXfnzcXNaxk3dYi75f?usp=sharing>



Gambar 2:
Pelaksanaan Pengabdian

b. Praktik Pembuatan Google Form dan Website Tracer

Pengelola masih terkendala dalam penyebaran kuesioner tracer study baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan juga internal sekolah dalam rangka mempersiapkan akreditasi terutama media yang

digunakan. Perkembangan zaman Dimana penggunaan teknologi sudah semestinya digunakan BKK SMK dalam rangka mensukseskan tracer study Kemendikbudristek dan tracer study internal sekolah.

Salah satu media pendukung sebagai strategi melakukan tracer study adalah menggunakan google formulir dan website secara gratis yang disediakan oleh google. Pelatihan penggunaan google form dan website dilakukan untuk memudahkan pengelola BKK SMK melakukan tracer study.



Gambar 3.
Penutupan Pelatihan BKK SMK di Provinsi Riau

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil kegiatan pengabdian yang dilaksanakan, adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari kegiatan tersebut adalah:

1. Pengelola BKK SMK siap mensukseskan tracer study Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2023.
2. Pengelola BKK SMK memahami tugas dan fungsinya
3. Pengelola BKK SMK mampu menggunakan media teknologi informasi dalam rangka melakukan tracer study yang dilakukan sekolah.
4. Pengelola BKK SMK mampu memahami strategi pemasaran tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) REpublik Indonesia Tahun 2004.

Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Dan Perluasan Kesempatan Kerja No. KEP-1907/PPTK-PKK/X/2018 Tentang Petunjuk Teknis Bursa Kerja Khusus